



Edisi I - 2009

# Buletin bpkrdm

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



## PENANDATANGANAN PAKTA K3

**7** Kunjungan Menteri  
Aljazair ke Indonesia

**9** Cerita dibalik  
Konstruksi Indonesia 2008

ISSN 1907-0136



**Pembina/Pelindung :**

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia,

**Penanggung jawab :**

Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia,

**Wakil Penanggung Jawab :**

Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi,  
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi,

Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi,

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi,

**Pemimpin Redaksi :**

Surtiningsih,

**Redaksi Pelaksana :**

Nanan Abidin,

**Anggota Redaksi :**

Doedoeng Z. Arifin,  
Bambang Soekaryanto,

Eddy Sunyoto,  
Sari Mustika,

Yaya Supriyatana,  
Ero,

Cakra Nagara,  
Agnes S.P. Trisnowati,

Titik Murti Utami,  
Subagio,

Yanto Apriyanto,  
Sri Yuliawati,

Sugeng Sunyoto,  
Kristina Pratiwi Hadi,  
Maria Ulfah,

**Administrasi dan Distribusi :**

Agus Kurniawan,  
Agus Firngadi

**Desain/Tata Letak :**

Yosaphat Bisma Wikantyasa,  
Nanang Supriyadi

**Photografer :**

Sri Bagus Herutomo

Perjalanan Jasa Konstruksi di Indonesia telah mencapai titik dimana tidak bisa lagi hanya sembunyi di kandang sendiri. Bukan hanya karena jasa konstruksi menjadi tulang punggung peningkatan perekonomian namun lebih dari itu jasa konstruksi telah menjadi salah satu sektor dari sedikit sektor yang masih mampu menyerap tenaga kerja di tengah deraan krisis ekonomi dunia.

Melihat betapa besar potensi jasa konstruksi untuk masyarakat Indonesia, maka selaknyalah jasa konstruksi harus didorong untuk semaksimal mungkin berkualitas dan berdaya saing, bahkan hingga ke pasar Internasional. Bukti nyata usaha ini telah kita ketahui bersama dengan keikutsertaan Indonesia pada Indonesia Solo Exhibition di United Arab Emirates tahun 2006 yang lalu.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Buku Doing Construction Business di Tahun 2007, dan di Tahun 2008

kembali Indonesia mengikuti The Big 5 The Exhibition Building The Middle East sekaligus Misi Konstruksi ke Dubai sebagai rangkaian Konstruksi Indonesia 2008. Hal ini tidak sia-sia, karena pada awal Tahun 2009 ini Menteri Pekerjaan Umum Al-Jazair Ammar Ghoul mengunjungi Indonesia dalam misinya untuk bekerjasama di bidang konstruksi.

Dengan terbitnya Buletin BPKSDM ini, kami redaksi berharap pembaca sekalian akan mendapat pencerahan dan wawasan baru mengenai bagaimana berkiprah di negara lain dari pengalaman pelaku jasa konstruksi Indonesia yang ada di luar negeri, sekaligus peluang dan tantangannya. Selain itu ada juga mengenai agenda kegiatan penting di lingkungan BPKSDM dan rencana kegiatan ke depan yang penting.

Selamat membaca edisi pertama Buletin BPKSDM ini, semoga dapat menambah wawasan anda.

## Peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi....!!



Pekerjaan infrastruktur dengan kemungkinan resikonya

**S**epenggal cerita dari penyelenggaraan bimbingan teknis sistem manajemen K3 kejadiannya sepele ....., seorang pekerja bangunan yang sehari hari bekerja melayani tukang batu untuk menyiapkan adukan semen, sedang membersihkan sisa-sisa adukan yang berceceran diatas tanah, tiba tiba jatuh ember yang berisi adukan, dari atas perancah setinggi lima meter. Walaupun tidak terlalu parah pekerja tersebut

sempat mendapatkan enam jahitan dikepalanya.

Kejadian yang serupa pada peristiwa dua minggu sebelumnya dimana seorang pekerja bangunan kejatuhan palu dari atas dinding, hingga sempat dirawat di rumah sakit dan mendapatkan lima jahitan dikepalanya dan kejadian tersebut hampir mengakibatkan fatal.

Peristiwa ke tiga terjadi akibat kelalaian seorang operator wheel loader yang sedang bekerja pada tempat yang sama dimana lokasinya relatif sempit karena banyak tumpukan puing dan material bangunan. Ketika merasakan ada getaran didalam celananya, dengan



cepat sang operator merogoh saku celananya dan mengambil telpon seluler yang baru dibeli, lalu bicara. Tiba-tiba bucket loadernya menyenggol perancah bangunan yang terpasang cukup tinggi dan banyak orang yang sedang bekerja diatasnya. Walaupun peristiwa tersebut tidak mengakibatkan cedera, namun sempat mengagetkan dan membuat panik para pekerja diatas serta beberapa sambungan batang besi perancah rusak.

Beberapa kejadian diatas disampaikan sebagai ilustrasi oleh seorang nara sumber dalam mengawali ceramahnya didepan peserta bimbingan teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK<sub>3</sub>), yang diselenggarakan di Kota Serang, Banten pada bulan Agustus 2008, dengan jumlah peserta 60 orang yang berasal dari para penyedia jasa.

Bimbingan teknis SMK<sub>3</sub> tersebut diselenggarakan oleh Balai Kajian Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi pada Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, BPKSDM bekerja sama dengan LPJK, dan nara sumber dari Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4), Departemen Tenaga Kerja dan Jamsostek.

### **Yang dapat dipetik dari contoh kejadian diatas.**

Hal yang menarik dari contoh peristiwa diatas adalah : bahwa frekuensi kejadiannya pada selang waktu yang tidak terlalu lama dan lokasi kejadian pada tempat yang sama serta modus kejadiannya hampir menyerupai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur kelalaian/ sembrono dari para pekerja sangat mendominasi disetiap kejadian kecelakaan akibat kerja serta tidak adanya instruksi kerja yang benar sesuai ketentuan, dari mandor, pengawas ataupun atasan yang berwenang menurut hirarki dalam organisasi perusahaan penyedia jasa tersebut.

Dari ilustrasi kejadian diatas dapat dipetik halhal yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) terutama untuk mengingatkan kita bahwa **"peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi"** apabila semua yang terlibat sadar dan masing-masing melakukan tugasnya secara bertanggung jawab dan konsisten terhadap penerapan SMK<sub>3</sub>.

### **Manajemen risiko K3.**

Konsekuensi logis dalam pelaksanaan proyek konstruksi adalah "risiko". Risiko merupakan sesuatu yang melekat dan tidak terpisahkan dari pekerjaan konstruksi. Setiap jenis kegiatan konstruksi yang dilaksanakan terdapat risiko kecelakaan yang harus dihadapi oleh setiap pelaku

kegiatan. Untuk itu yang harus dilakukan adalah mengelola risiko melalui penerapan manajemen risiko atau yang dikenal dengan "HIRARC" (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) yaitu : mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat serta mengendalikan risiko.

Keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko, akan menentukan tingkat keberhasilan dalam upaya menekan / meminimalisir risiko kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja. Keberhasilan tersebut dapat diindikasikan dengan meningkatnya produktifitas kerja yang disebabkan oleh berfungsinya secara optimal semua sumber daya yang dimiliki dan/ atau ditandai dengan zero accident. Oleh karena itu yang terpenting dalam menerapkan manajemen risiko adalah bagaimana seorang tenaga ahli SMK<sub>3</sub> dapat menggali/ mengidentifikasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta melakukan upaya pengendalian risiko sesuai menurut tingkat risiko yang dihadapi.

Pengendalian risiko merupakan bagian dari manajemen risiko dan dilakukan berdasarkan penilaian risiko terhadap masing-masing item pekerjaan.

Dengan mempertimbangkan peralatan yang digunakan, jumlah orang yang terlibat pada masing-masing item pekerjaan, akan dapat diprediksi peluang kejadian (frequency) dan tingkat keparahan (severity) dari risiko kecelakaan. Dengan mengalikan nilai peluang kejadian dan tingkat keparahan tersebut akan menghasilkan nilai/tingkat risiko, sebagai contoh : [frequency (3) x severity (3)], sehingga nilai risiko = (9) **(tingkat risiko tinggi)**.

Untuk tingkat risiko kecil/rendah apabila nilainya 1 - 3, risiko sedang 4 - 6 dan tingkat risiko besar /tinggi apabila nilainya mencapai angka 7 - 9.

Menurut hirarki cara berpikir dalam melakukan pengendalian risiko adalah dengan memperhatikan besaran nilai risiko/ tahapan pengendalian risiko, seperti berikut:

1. Mengeliminasi/ menghilangkan sumber bahaya terhadap kegiatan yang mempunyai tingkat risiko yang paling tinggi/besari;
2. Melakukan substitusi/ mengganti dengan bahan atau proses yang lebih aman;
3. Engineering : melakukan perubahan terhadap desain alat/ proses/ layout;
4. Administrasi : pengendalian risiko

melalui penyusunan peraturan/standar untuk mengajak melakukan cara kerja yang aman (menyangkut tentang prosedur kerja, ijin kerja, instruksi kerja, papan peringatan/ larangan, pengawasan/ inspeksi, dsb);

5. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

Untuk itu cara berpikir dalam melakukan pengendalian risiko, perlu ditanamkan pada setiap pelaku kegiatan. Terkait dengan contoh kasus diatas, meskipun upaya untuk melakukan pengendalian risiko telah dilakukan sesuai tahapan/tingkatan risiko, namun apabila tingkat risiko yang dihadapi terlalu besar, maka upaya pencegahan harus dilakukan sampai pada tahap yang paling akhir yaitu diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) bagi setiap pelaku kegiatan.

Undang-undang RI No.1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja, berlaku secara nasional dan merupakan induk dari semua peraturan keselamatan kerja yang berada dibawahnya. Walaupun judulnya "Keselamatan kerja" sesuai bunyi pada pasal 18, materinya mengatur juga tentang "kesehatan kerja".

Undang-undang RI No.1 tahun 1970 diterbitkan sebagai pengganti dari **Veiligheids (VR) 1910**, dengan perubahan yang mendasar, antara lain : bersifat lebih preventif, ruang lingkupnya yang lebih luas dan tidak hanya menitikberatkan pengamanan terhadap alat produksi.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain disebutkan pada:

Pasal 22, ayat (2) huruf l, **Undang-undang RI No.18 tahun 1999**, menyebutkan kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai : perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.

Pasal 17 **PP No.29 tahun 2000** tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pada salah satu ayatnya menyebutkan bahwa: Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil

dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan.

Pasal 30 ayat (1) **PP No.29 tahun 2000** menyebutkan bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:

- keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Risiko kecelakaan kerja dapat diduga sebelumnya.**

Pada umumnya, kecelakaan kerja selalu ditafsirkan sebagai kejadian yang tidak diduga, namun sebenarnya, hal tersebut dapat diramalkan/ diduga dengan melihat dari perbuatan dan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara aman/selamat, dan mengatur peralatan dan perlengkapan produksi sesuai standar yang diwajibkan oleh undang-undang adalah suatu cara yang bijaksana untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja.

Dalam bukunya "The Accident Prevention", H.W. Heinrich mengungkapkan bahwa 80 % kecelakaan kerja disebabkan oleh perbuatan yang tidak aman (unsafe act) dan hanya 20 % akibat kondisi yang tidak aman (unsafe condition). Untuk itu perlu menjadikan perhatian dan catatan bagi pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem manajemen K3 diperusahannya, yaitu tentang faktor yang dapat menyebabkan seorang pekerja melakukan perbuatan berbahaya, diantaranya disebabkan oleh : kurangnya pengetahuan dan ketrampilan serta sikap/perilaku dari pekerja; keletihan atau kebosanan; cara kerja yang tidak sepadan secara ergonomis; gangguan psikologis dan pengaruh sosial-psikologis.

Apabila dijumpai faktor-faktor seperti tersebut diatas, maka kewajiban bagi pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam mengelola SMK<sub>3</sub> untuk segera melakukan tindakan dalam upaya pencegahan timbulnya risiko kecelakaan akibat kerja.

### **Komitmen penerapan K3**

Keberhasilan penyelenggaraan dan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) bagi perusahaan, sangat ditentukan oleh

adanya "Komitmen K3 " perusahaan penyedia jasa. "**Komitmen K3** " adalah suatu cerminan tekad perusahaan dalam membangun SMK3 yang selanjutnya diwujudkan menjadi "**Kebijakan K3**"; yaitu pernyataan tertulis dari manajemen puncak terhadap penerapan SMK3.

Acuan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun "komitmen" dan "kebijakan" SMK3 bagi perusahaan penyedia jasa, antara lain:

1. Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pada
  - pasal 86, yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak **untuk memperoleh perlindungan** atas : keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.
  - Pasal 87, menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum, No.Kep.174. / Men/1986; No:104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi, dimana pada butir butir dari salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pada intinya suatu perusahaan harus memiliki komitmen dalam membangun Sistem Manajemen K<sub>3</sub>.

### **Kebijakan Departemen PU dalam penerapan SMK3**

Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta upaya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi bidang pekerjaan umum, Departemen Pekerjaan Umum telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2008 tentang **Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.**

Sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan menteri tersebut adalah untuk memberikan acuan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum, yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi serta semua pemangku kepentingan agar mengetahui dan memahami tugas dan kewajibannya dalam penerapan SMK3.

### **Tugas dan fungsi BPKSDM terhadap pembinaan SMK3**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum, melalui Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi telah melakukan beberapa kajian dan bimbingan teknis penerapan SMK3 pada kegiatan konstruksi bidang pekerjaan umum, termasuk mensosialisasikan Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan



Cermin keselamatan kerja



Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi, bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa, dibeberapa provinsi ditanah air.

Dalam perkembangannya pembinaan tersebut masih banyak yang harus ditingkatkan terutama pemahaman prosedur penyusunan program kegiatan dan penyusunan kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan SMK3. Untuk itu pada kesempatan mendatang, berencana akan menyelenggarakan seminar dengan mengundang pakar/ ahli tentang SMK3 dari berbagai lembaga/ asosiasi terkait, penyedia jasa, ataupun perguruan tinggi.

Dari penyelenggaraan seminar tersebut diharapkan dapat dirumuskan upaya yang lebih efektif untuk mendorong terwujudnya penerapan SMK3 secara penuh disetiap kegiatan konstruksi bidang pekerjaan umum.

Pada penutupan acara bimbingan teknis SMK3 yang dilanjutkan dengan ujian sertifikasi ahli muda SMK3 bagi penyedia jasa, oleh Kepala Balai Kajian Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi telah disampaikan informasi dan pesan serta sekaligus mengingatkan kita, antara lain:

- Bagi peserta yang lulus ujian sertifikasi ahli muda SMK3, akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan dari A2K4, LPJK dan Departemen Tenaga Kerja.
- Sebagai tenaga ahli muda ataupun petugas SMK3 konstruksi dilingkungan perusahaan penyedia jasa, diharapkan untuk selalu

meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan serta menimba pengalaman tentang SMK3, guna dapat diterapkan dilingkungan kerja masing-masing sebagai upaya untuk menekan tingkat risiko kecelakaan dan timbulnya penyakit akibat kerja dalam rangka upaya meningkatkan produktifitas nasional.

- Melihat peristiwa kecelakaan akibat kerja yang terjadi pada akhir- akhir ini yang mengakibatkan beberapa pekerja tewas akibat jatuhnya gondola, kejadian tersebut agar menjadikan perhatian dan pertimbangan untuk segera menerapkan SMK3 dilingkungan kerja masing-masing.

Menimba pengalaman dari penyelenggaraan bimbingan teknis SMK3 di Serang, Banten, menjadi lebih menarik ketika nara sumber mengatakan bahwa penerapan SMK3 harus diawali dengan niat yang sungguh-sungguh, bersih dan tulus, dilaksanakan secara konsisten dan dimulai dari diri sendiri kemudian berkembang pada lingkungan yang lebih luas termasuk lingkungan kantor dari masing-masing peserta.

Berpijak dari kalimat yang disampaikan oleh nara sumber, mengingatkan kita, bagaimana dengan lingkungan kantor, apakah sudah menjamin aman terhadap risiko kecelakaan yang mungkin dapat terjadi disetiap saat dan dapat

mencederai siapa saja, baik penghuninya ataupun orang lain yang sedang berkunjung. Terlebih ketika kita mengingat bagaimana dengan peralatan/ pesawat lift yang semakin tua, serta jaringan listrik yang selalu bertambah beban ataupun alat pemadam kebakaran ringan (APAR) serta hidran yang tersedia masih dapat berfungsi dengan baik?

Pertanyaan berlanjut ketika kita mengingat tentang risiko kebakaran, yaitu tentang pemahaman penyelamatan diri maupun orang lain serta penyelamatan barang/peralatan termasuk arsip penting apabila terjadi kebakaran. Sebab konon ceritanya suatu bangunan yang menyimpan material/ bahan yang mudah terbakar dengan jumlah yang relatif banyak, apabila terjadi kebakaran dan dalam waktu 10 sampai 15 menit api belum dapat dipadamkan, maka hampir dapat dipastikan seluruh isi bangunan tersebut akan habis terbakar.

Hanya dengan harapan dan keyakinan yang pasti serta berkat doa bersama, semoga tingkat risiko kecelakaan akibat kerja dilingkungan kantor masih dalam batas aman.(goes djoko p)

**Semoga!!!!**

**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSTRUKSI**  
**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA**

<b>1. KETELADANAN UNTUK KESELAMATAN</b> KEPERTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA MELAKUKUKAN PELATIHAN DAN PENYERVIKSIAN TERHADAP MITRA KERJA DALAM MELAKUKUKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN KONSISTEN	<b>2. KEUTAMAAN UNTUK KESELAMATAN</b> KEPERTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA MELAKUKUKAN KEGIATAN AMAN DAN KESELAMATAN DALAM MELAKUKUKAN KEGIATAN KONSTRUKSI	<b>3. INTEGRASI UNTUK KESELAMATAN</b> MELAKUKUKAN KEGIATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MELAKUKUKAN KEGIATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MELAKUKUKAN KEGIATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MELAKUKUKAN KEGIATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	<b>4. KOMPETENSI UNTUK KESELAMATAN</b> KEPERTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA MELAKUKUKAN PELATIHAN DAN PENYERVIKSIAN TERHADAP MITRA KERJA DALAM MELAKUKUKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN KONSISTEN	<b>5. PENGETAHUAN UNTUK KESELAMATAN</b> KEPERTEMEN PEKERJAAN UMUM BERSAMA MITRA KERJA MELAKUKUKAN PELATIHAN DAN PENYERVIKSIAN TERHADAP MITRA KERJA DALAM MELAKUKUKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN KONSISTEN
--	--	--	---	--

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, bertekad menegakan komitmen sebagai berikut ini:

Jakarta, 14 Desember 2019  
 Menteri Pekerjaan Umum

**Djoko Rismanto**  
 Kepala BPSDM

Sekretaris Jenderal  Agus Wijanarko	Inspektur Jenderal  Muhammad Basoeki Hadimuljoko	Kepala BPSDM  Sumaryanti Kusyatin	P. U. Kepala Bidang  Hendrianto Katusugondo	Ketua Umum LPJK  H. M. Melkan Amir
Wakil Sekretaris Jenderal  Win Nurhasan Umar	Wakil Inspektur Jenderal  Achmad Firmanto Gandas	Wakil Kepala BPSDM  Dedi Yuwono Pragasudirjo	Wakil Kepala Bidang  Imam Santoso Elrazi	

Penandatanganan pakta komitmen K3

# Akhirnya, Penandatanganan Pakta Komitmen K3 Konstruksi



Pembacaan Pakta Komitmen K3

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno menyatakan bahwa K3 merupakan tanggung jawab bersama. K3 juga merupakan faktor pendukung pertumbuhan perekonomian, karena variabel utama dalam pembangunan adalah pelaku yang bukan hanya meliputi pengusaha, melainkan juga tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Pakta Komitmen tersebut ditandatangani bersama oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan disaksikan oleh jajaran eselon satu di lingkungan Departemen PU dan Ketua LPJKN, terkait dengan penetapan Gerakan Nasional K3. Tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2009 juga ditetapkan sebagai bulan K3 Nasional, sedangkan tahun 2009 dicanangkan sebagai Tahun K3 Konstruksi

## **“Keselamatan adalah hakikat kehidupan”**

ungkap Djoko Kirmanto dalam pidatonya pada acara Penandatanganan Kebijakan dan Pakta Komitmen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi di Pendopo Departemen PU (12/2). “Prinsip ini akan melahirkan bahwa “keselamatan” akan menjadi kebutuhan utama setiap individu makhluk hidup dalam segala aktifitas kehidupannya, tidak terkecuali pelbagai aktifitas manusia terkait dengan penyelenggaraan konstruksi”, lanjutnya.

Demikian kiranya sekelumit pembukaan yang disampaikan Menteri PU Djoko Kirmanto saat membuka acara Penandatanganan yang telah dinanti oleh semua pihak tersebut. Bisa dikatakan dinantikan, melihat bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan isu yang sangat krusial bila melihat angka kecelakaan kerja yang tidak bisa dibilang kecil di bidang konstruksi.

Tercatat 11 orang pekerja konstruksi, diantaranya operator gondola dan installer atap baja ringan, pada Tahun 2008 lalu meninggal saat bekerja. Angka yang tidak bisa dibilang kecil jika menyangkut nyawa manusia. Meski demikian, perhatian pada K3 itu sendiri masih kecil, baik oleh Pengguna Jasa maupun bahkan oleh pekerja itu sendiri. Seperti keengganan menggunakan alat-alat pengaman dan lain sebagainya.

Prosesi Penandatanganan Pakta Komitmen dilanjutkan dengan Diskusi Publik yang merumuskan diantaranya menekankan bahwa budaya K3 dapat dilaksanakan apabila semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami K3 harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan konstruksi. K3 bukan hanya tanggung jawab dari kontraktor saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pengguna jasa. (MU, Sekretariat BPKSDM)



Penyerahan simbolis sertifikat tenaga Kerja yang bekerja di luar negeri



**S**etelah tekad Indonesia untuk membuka peluang ke pasar konstruksi Internasional melalui rangkaian kunjungan dalam rangka Misi Konstruksi ke beberapa Negara Timur Tengah, akhirnya tekad itu mulai menuai hasilnya.



Menteri PU Aljazair dan Menteri PU Indonesia

Cukup menarik perhatian karena Menteri PU Indonesia sendiri menyatakan keinginannya untuk mempelajari secara langsung regulasi maupun program secara terinci mengenai perumahan rakyat.

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya Selasa (13/01) Menteri Pekerjaan Umum Al-Jazair Ammar Ghoul melakukan kunjungan kerja ke Indonesia dan diterima oleh Menteri Pekerjaan Umum Indonesia Djoko Kirmanto, di ruang rapat Menteri PU. Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Perwakilan Direksi BUMN.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Aljazair Ammar Ghoul menawarkan proyek-proyek strategis kepada pelaku jasa konstruksi di Indonesia. Proyek-proyek strategis tersebut terkait dengan program pengembangan wilayah secara besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintah Al-Jazair hingga Tahun 2025. Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan Jalan raya (mencakup 11.000 km jalan dan 5000 jembatan), Pelabuhan udara, Pelabuhan Air, dan pendukung sarana Kereta Api. Khusus untuk pembangunan jalan, tender akan dimulai pertengahan Tahun 2009 ini, terutama jalan tol sepanjang 3000 km.

Menteri PU Djoko Kirmanto sendiri sangat menyambut baik kesempatan yang ditawarkan Pemerintah Aljazair ini dengan mendorong pelaku jasa konstruksi di Indonesia untuk mempersiapkan diri berkiprah di pasar luar negeri. Terutama kepada beberapa perusahaan atau BUMN karya yang telah berpengalaman di pasar Timur Tengah, seperti PT. Adhi Karya yang telah mengerjakan proyek di Aljazair meski hanya sebagai sub kontraktor Perusahaan milik Jepang.

Namun Djoko Kirmanto juga meminta kepada Menteri PU Aljazair untuk memberikan arahan bagaimana pelaku jakons Indonesia bekerja di Aljazair. "Kita butuh informasi

bagaimana bekerja di proyek pemerintah, permodalan, peralatan, Bank, tatacara tender, hingga peluang jasa konstruksi dari luar Aljazair untuk berkiprah disana", tambah Djoko Kirmanto.

Menanggapi hal ini Ammar Ghoul secara langsung mengundang Menteri Pekerjaan Umum Indonesia untuk bertandang ke Aljazair bersama para kontraktor lengkap beserta proposal nyata. "Saya akan siapkan forum pertemuan teknis dengan pengembang-pengembang yang ada di Aljazair", ujar Ammar Ghaoul.

Dikatakan Ammar Ghoul bahwa negaranya tengah dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur dengan menetapkan lima sektor prioritas hingga Tahun 2025 antara lain Jalan dan jembatan, per-Kereta Api-an, Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut dan Perumahan.

Di Aljazair sendiri terdapat beberapa proyek yang penting antara lain 5.000 proyek terkait pembangunan jalan, 500 proyek terkait pembangunan jembatan, 2000 proyek terkait air dan sanitasi dan 200 proyek studi kelayakan. Dan yang cukup menarik perhatian adalah Aljazair telah melaksanakan program satu juta rumah dimana 40 % diantaranya merupakan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu.



Pertukaran Cenderamata antara Dirut WIKA dengan Menteri PU Aljazair

"Saya sangat kagum dengan program satu juta rumah di Aljazair ini, padahal di Indonesia sendiri lebih banyak penduduknya daripada Aljazair. Ke depan saya akan lihat apakah hal ini bisa diterapkan di Indonesia", ujar Djoko Kirmanto.

Menyadari besarnya kebutuhan akan kontraktor dan konsultan untuk mewujudkan target pembangunan infrastruktur, maka Aljazair menawarkan peluang usaha kepada Indonesia, yang dapat dikatakan sebagai 'teman lama' seperjuangan dengan Indonesia, mengingat sejarah panjang kerjasama yang apik semenjak Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.

Pada akhir pertemuan, Menteri PU Aljazair dan Menteri PU Indonesia menandatangani nota kesepahaman antara lain mengenai kerjasama teknis, program-program infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Namun lebih lanjut menurut Ammar Ghoul kerjasama nota kesepahaman ini akan dibahas lebih lanjut menunggu kedatangan Menteri PU Indonesia ke Aljazair.

Menteri PU Aljazair pada intinya akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Negara di dunia ini untuk berinvestasi dan membantu pembangunan infrastruktur. Meski demikian akan ditentukan dua penilaian bagi mereka yang akan berkiprah di pasar konstruksi Aljazair, yaitu waktu pelaksanaan pembangunan yang cepat dan tepat sekaligus berkualitas tinggi.

Selama tiga hari kunjungannya di Indonesia, Menteri PU Aljazair akan melakukan kunjungan ke beberapa tempat antara lain Kementerian BUMN

# Workshop Lindak Lanjut Pameran dan Misi Konstruksi Indonesia ke UAE

RI, Masjid Istiqlal, Pabrik Beton milik PT. Wijaya Karya, Kementerian Luar Negeri RI, Istana Wakil Presiden RI, Proyek Cengkareng, Waduk Jatiluhur, Jalan Tol Cipularang, Museum Asia-Afrika di Bandung, Taman Mini Indonesia Indah, serta beberapa bisnis meeting dengan pengusaha Indonesia.

Kunjungan Ammar Ghoul ke beberapa proyek infrastruktur di Indonesia antara lain ke Bendungan Jatiluhur di Purwakarta, Jalan Tol Cipularang Seksi II, Jembatan Cikubang dan Pasopati di Bandung, Rusunawa di Cengkareng dan Pre-Stressed Concrete PT Wijaya Karya di Cileungsi.

Ternyata Menteri PU Aljazair cukup memberikan perhatian kepada infrastruktur yang dikunjungi. Terbukti dari komentarnya bahwa perlu ada pemeliharaan dan upaya untuk memperbaiki infrastruktur yang telah ada dan diadaptasi sesuai tuntutan modernisasi. Perlu demikian, menurutnya karena infrastruktur ke-PU-an merupakan sektor utama dalam memberikan fasilitas umum bagi publik.

BPKSDM Dep.PU sendiri sebagai bagian dari pendorong Pembangunan Konstruksi Indonesia, termasuk di dalamnya pelaku jasa konstruksi, telah melakukan berbagai upaya untuk menunjang usaha tersebut. Salah satunya dengan telah diterbitkannya Buku 'Doing Construction Business in United Arab Emirates', sebagai hasil survey Tim Departemen PU untuk menjadi panduan berkhiprah di Timur Tengah terutama di UAE.

Kini dalam waktu dekat BPKSDM akan kembali menerbitkan Buku Doing Construction di 3 negara Timur Tengah yaitu Aljazair, Libya, dan Arab Saudi. Diharapkan dari adanya buku panduan ini akan menambah wawasan pelaku jasa konstruksi Indonesia untuk berkhiprah di pasar Internasional terutama di Timur Tengah. Tentunya jangka panjangnya, jasa konstruksi Indonesia akan berkibar sebagaimana Merah Putih berkibar di angkasa.

\*dari berbagai sumber\*  
(TW, Sekretariat BPKSDM)



Kota Dubai

Sebagai kelanjutan Misi Konstruksi yang telah dilakukan Departemen PU dan rombongan pada akhir November lalu, dilakukanlah Workshop untuk membahas follow-up sekaligus review terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kamis (11/12) di Jakarta.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh peserta rombongan baik dari Departemen PU, LPJKN, Asosiasi Perusahaan dan Profesi, BUMN, maupun swasta tersebut dibahas segala macam permasalahan dan kendala serta usulan untuk mensukseskan usaha pelaku jasa konstruksi nasional memasuki pasar internasional.

Kepala BPKSDM Sumaryanto Widayatin yang membuka forum ini mengatakan mendorong sekaligus menantang pelaku jasa konstruksi nasional untuk mengambil kesempatan yang tersedia seluas-luasnya di Pasar Timur Tengah terutama di United Arab Emirates. Mengingat dalam kondisi krisis global seperti saat ini, Pasar Timur Tengah tidak terlalu terkena dampak langsung sekaligus Pembangunan Infrastruktur disana yang dilaksanakan secara besar-besaran.

Mengingat bahwa misi yang dilakukan ini merupakan cara untuk mendorong pelaku jasa konstruksi nasional memperluas pasar, meningkatkan lapangan pekerjaan, serta tentunya meningkatkan devisa negara. Terkait dengan point di atas setiap Pelaku Jasa Konstruksi hendaknya mempersiapkan diri memasuki pasar luar negeri antara lain pengenalan medan dapat dengan belajar (magang) dengan Perusahaan Indonesia yang

telah memiliki pengalaman sebelumnya di Timur Tengah, pengenalan peraturan yang terkait di Timur Tengah, Peraturan dan persiapan modal yang mendukung khiprah ke pasar luar negeri.

Sangat disadari usaha menuju perluasan pasar tersebut masih menemui banyak kendala. Kendala tersebut diuraikan antara lain *Pertama* Tenaga kerja yang selama ini memasuki pasaran luar negeri seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kompetensi. Karenanya diharapkan bantuan Pemerintah dalam hal ini Departemen PU untuk menyediakan tenaga kerja yang tepat dan memiliki kompetensi sesuai, misalnya dengan training-training untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui Internasional.

Patut juga diperhatikan mengingat tenaga kerja yang dinilai kompeten disana adalah yang memiliki pengalaman minimal 10 tahun karenanya permasalahan training harus memperhatikan umur. Kendala permasalahan untuk membawa tenaga kerja masuk ke Timur Tengah yang cukup ketat.

*Kedua*, Permodalan adalah masalah lain yang menjadi kendala. Selama ini pelaku jasa konstruksi Indonesia harus pinjam uang dari Bank (biasanya Bank Mandiri) dan dalam bentuk rupiah kemudian harus dikonversikan lagi dalam dollar atau sesuai mata uang negara tersebut. Dengan demikian ada double exchange rate dan tentunya dengan bunga yang cukup tinggi.

*Ketiga*, kendala sulitnya membawa modal ke Timur Tengah dan kendala kurangnya wawasan pelaku jasa konstruksi nasional akan peraturan di negara tertentu dapat diatasi salah satunya dengan bergabung dengan partner lokal. Hanya saja setiap pelaku jasa konstruksi Indonesia harus selektif terhadap partner lokal tersebut, karena bila ada permasalahan akan menyulitkan untuk memutuskan hubungan. Dalam hal ini PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT) yang telah memiliki pengalaman di Timur Tengah terutama di UAE, menawarkan untuk menyediakan kantor perwakilan bagi pelaku jasa konstruksi nasional yang hendak mencoba berkhiprah disana.





Modern Building di Dubai

*Keempat*, Untuk mendapatkan *performance bond* ada empat tahap yang harus dilewati dimana setiap tahap ada provisinya untuk mendapatkan Bank Guarantee. Dengan adanya masalah ini hendaknya dapat disampaikan ke Bank Indonesia untuk dapat dilakukan kebijakan. Mengingat apabila konstruksi berhasil dapat mendatangkan devisa bagi negara.

*Kelima*, Perpajakan untuk berkiprah ke luar negeri masih memberatkan, terutama PP No.51 Tahun 2008 Tentang Pajak Final untuk Jasa Konstruksi dalam hal ini mengenai PPh final yang hingga kini masih sebesar 3 %. *Keenam*, Faktor masih adanya 'arranger' atau calo di sana perlu diperhatikan karena bagaimanapun menghambat kinerja.

*Keenam*, Perijinan juga masih menjadi kendala, karena hingga saat ini untuk membuat Visa harus menunggu hingga tiga minggu sementara negara lain dapat membuat visa untuk tenaga kerja masuk saat kedatangan (Arrival Visa). Serta *Ketujuh*, Kelemahan yang ada pada kontraktor Indonesia untuk berkiprah di luar negeri selama ini antara lain lemahnya pengetahuan dalam hal kontrak sehingga sering kalah tender dan sekaligus lemah dalam hal networking sehingga belum bisa publikasi dan menjadikan kemampuan logistik pelaku jasa konstruksi lokal lemah.

Selain kendala-kendala yang dihadapi, ada beberapa wacana juga yang muncul sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Wacana tersebut antara lain bagi perusahaan atau pelaku jasa

konstruksi lokal yang baru mulai merambah pasar luar negeri terutama di Timur Tengah, salah satu cara yang tepat adalah membidik negara yang memiliki budget alokasi dana pembangunan konstruksi yang besar namun berpenduduk sedikit. Tentunya hal ini untuk mengurangi tingkat persaingan.

Pemerintah menjadi ujung tombak yang sangat penting untuk memperlancar keberhasilan pelaku jasa konstruksi memasuki pasar Timur Tengah, karenanya diperlukan pembicaraan antara Dep. PU, Dep. Keuangan, Bank Indonesia, Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Departemen lain terkait untuk menghasilkan kebijakan terutama fiskal bagi pelaku jasa konstruksi yang akan berkiprah ke luar negeri.

Selain itu peran lobby Government to Government (G2G) juga diharapkan. Apalagi mengingat budaya Timur Tengah yang senang dengan budaya silaturahmi, sebagaimana yang selama ini dilakukan Pemerintah Malaysia dengan rutin berkunjung kesana. Ada juga wacana agar pelaku jasa konstruksi Indonesia, terutama BUMN Karya untuk bersatu membentuk koalisi bersama tentunya dengan arahan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum khususnya BPKSDM.

Untuk pameran yang telah dilakukan, reviewnya ke depan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sekaligus menyiapkan tempat dan stand pameran yang lebih representatif, promosi baik untuk mengajak peserta pameran lebih digencarkan dan dilakukan lebih awal untuk materi dan alat-alat promosi (seperti brosur dan leaflet), serta dipersiapkan lebih banyak one on one meeting dengan pihak-pihak strategis di Timur Tengah khususnya UAE.

Setiap usaha yang akan mendorong Infrastruktur dan jasa konstruksi harus didorong dengan usaha yang maksimal, mengingat infrastruktur sangat strategis dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.  
(TW, Sekretariat BPKSDM)

# Cerita Dibalik Konstruksi Indonesia 2008

Konstruksi Indonesia 2008 telah melewati, namun dengungunya masih terasa hingga kini. Konstruksi Indonesia 2008, kegiatan yang dilandasi semangat apresiasi terhadap peran industri Jasa Konstruksi pada pembangunan di Indonesia, diawali dengan kegiatan Tukang dan Mandor dan berakhir dengan kegiatan Jalan Santai dan Sepeda Gembira. Semua dilaksanakan dengan tujuan memajukan konstruksi di Indonesia.

Tema yang diangkat pada Konstruksi Indonesia 2008 kali ini adalah "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Melalui Inovasi Teknologi Konstruksi. Bukan sesuatu yang muluk karena memang bumi ini harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak yang masih bertengger dan hidup di atasnya, tak terkecuali tentunya oleh masyarakat konstruksi.

Infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah suatu keharusan yang diperlukan masyarakat. Mungkin dengan demikian akan terjadi sinkronisasi antara pekerjaan infrastruktur dengan lingkungan yang selama ini bisa dikatakan sering bertolak belakang. Dari sinilah pelaku konstruksi dituntut terus menciptakan inovasi teknologi agar mampu bersaing dan memberikan solusi terutama dalam permasalahan perekonomian sekaligus permasalahan lingkungan.



Pembukaan Konstruksi Indonesia 2008 oleh Menteri PU



Kunjungan Presiden RI pada Pameran Konstruksi Indonesia 2008

"Itulah alasan Departemen PU menyelenggarakan event Konstruksi Indonesia 2008, karena dengan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mudah-mudahan mampu mendorong industri konstruksi kita jadi lebih maju", tegas Sumaryanto Widayatin dalam jumpa pers di Jakarta (16/6). Pada kesempatan itu pula Kepala BPKSDM menjelaskan pentingnya mengangkat Green Construction atau Konstruksi yang berwawasan lingkungan menjadi tema besar Konstruksi Indonesia 2008. Disadari kerusakan lingkungan harus ditangani bersama.

Konstruksi Indonesia berupa rangkaian kegiatan yang diikuti oleh masyarakat jasa konstruksi. Rangkaian kegiatan terbaru yang diadakan di tahun 2008 adalah: Konferensi dan Pameran Internasional di Jakarta, Penyusunan dan Peluncuran Buku oleh Wakil Presiden RI, Keikutsertaan dalam *The Big 5 Building The Middle East* dan Misi Konstruksi di Timur Tengah, *Charity Golf Tournament*, Jalan Santai serta *Funbike*.

Rangkaian kegiatan KI yang rutin dilakukan sejak tahun 2003 dan kembali ada di tahun 2008 ini adalah : Lomba Tukang dan Mandor, Lomba Foto Konstruksi, Lomba Jurnalis/Karya Tulis, Lomba Karya Ilmiah terkait dengan Konstruksi, Lomba Karya Konstruksi, Lomba Prestasi Badan Usaha Jasa Konstruksi juga Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia.

Secara garis besar rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia yang telah dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut:  
Lomba Tukang dan Mandor (4 Agustus 22 November)

Merupakan ajang kompetisi yang memberikan akses seluas-luasnya kepada para pelaksana pekerjaan konstruksi untuk memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi.

- a. Lomba Tukang Kayu
  - Juara I : M.CHudori
  - Juara II : Sandri
  - Juara III : Budhi Tri Haryanto
- b. Lomba Tukang Plumbing
  - Juara I : Hendrik
  - Juara II : Joko
  - Juara III : Katiman
- c. Lomba Tukang Batu
  - Juara I : Warjito
  - Juara II : Kuswara S.
  - Juara III : Nengah Surata
- d. Lomba Tukang Pembesian
  - Juara I : M.Hidayat
  - Juara II : Moch.Malik
  - Juara III : Sriyono
- e. Lomba Tukang Installer
  - Juara I : Syafiudin
  - Juara II : Iwan Trianto
  - Juara III : Ilham
- f. Lomba Tukang Taman
  - Juara I : Tulus
  - Juara II : Adi Sucipto
  - Juara III : Sungkono
- g. Lomba Tukang Mandor Kayu
  - Juara I : Pauziansyahi
  - Juara II : Nur Kholik
  - Juara III : Zaenal Arifin
- H. Lomba Tukang Mandor Bangunan Gedung/Pelaksana Level III
  - Juara I : Basuki Rahmat
  - Juara II : Warso
  - Juara III : Rabono
- i. Lomba Tukang Installer (konstruksi Baja Ringan) Beregu
  - Juara I : Rudi Santoso
  - Juara II : Achmad Kusnadi
  - Juara III : Saprudin

Lomba Foto Konstruksi (18 September 17 November) Merupakan kegiatan visualisasi foto yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan kegiatan konstruksi di Indonesia.

- Pemenang Lomba Foto Konstruksi:
- a. Foto Hitam-Putih
    - Juara I : Tino Oktaviano dengan Judul Pasang Kulit Kubah
    - Juara II : Fransiskus P. Simbolon dengan Judul Sudut Gedung
    - Juara III : Tundra Laksamana dengan Judul In Frame
  - b. Foto Berwarna
    - Juara I : Andika Wahyu W dengan Judul Solid
    - Juara II : Mosista Pambudi dengan Judul Saksi Pembangunan
    - Juara III : Afriadi Hikmal dengan Judul V
    - Juara Favorit : Shandy Irawan dengan Judul Frames and Workers

Lomba Jurnalistik/Karya Tulis (18 September 14 November)

Merupakan kegiatan sebagai wujud penghargaan terhadap tulisan yang berbobot dalam bidang konstruksi untuk pengembangan dan kemajuan konstruksi Indonesia.

- Pemenang Lomba Jurnalistik;
- a. Pemenang Artikel/Laporan
    - Juara I : Harian Kompas dengan Judul Indonesia dan Jamban Terpanjang di Dunia
    - Juara II : Harian Media Indonesia dengan Judul Masalah Penumpukan Sampah Butuh Perubahan Sistem Pengolahan
    - Juara III : Harian Sinar Harapan dengan Judul Atasi Banjir, Pemerintah Seriuskah?
  - b. Pemenang Tajuk Rencana
    - Juara I : Harian Suara Pembaruan dengan Judul Separuh Kota Bisa Jadi TPA
    - Juara II : Harian Media Indonesia dengan Judul Jalan Negara dan Wajah Bangsa
    - Juara III : Harian Kompas dengan Judul Infrastruktur Irigasi Hancur
  - c. Pemenang Foto Berita
    - Juara I : LKBN Antara Jefriez/NZ dengan Judul Asuransi Gondola
    - Juara II : Harian Pelita Guh dengan Judul Kerangka Tiang



Pancang

Juara III : Suara Pembaruan  
Ignatius Liliek dengan Judul  
Bisnis Properti

d. Pemenang Berita Terbanyak

Juara I : Harian Investor Daily

Juara II : Harian Bisnis Indonesia

Juara III : Harian Kompas

Lomba Karya Ilmiah Terkait Konstruksi  
(18 September-13 November)

Karya tulis yang bersifat ilmiah dan  
memiliki kaitan dengan bidang  
Konstruksi.

Pemenang Lomba Karya Ilmiah :

a. Kategori Mahasiswa :

Juara I : Haryani

Juara II : Apriliana Hidayat

Juara III : Didik Listi Abi

b. Kategori Umum :

Juara I : Wiratman Wangsadinata  
dan Wiryanti Arif

Juara II : Dewi Larasati ZR

Juara III : Sofia W. Alisjahbana

c. Kategori Pelajar :

Juara I : Afiazka Luthfita dan Puji  
Purnaweni

Juara II : Agus Sholikin

Juara III : Fahmi Hakim dan  
Wahyu Sukestyastama Putra



Stand Dep. PU



Ketua umum LPJKN, Kepala BPKSDM, Wakil Presiden RI, Menteri PU, Kepala BKPM sebelum Tea Off Golf KI 2008.

Lomba Karya Konstruksi (1 Mei-18  
November)

Merupakan penghargaan terhadap hasil  
karya yang mampu menghasilkan karya  
rancang bangun yang memenuhi cita  
rasa seni yang tinggi serta bangunan  
yang handal, dan aspek manajemen  
konstruksi serta berbagai aspek lain  
yang menonjol di bidang konstruksi.

Pemenang Lomba Karya Konstruksi  
antaranya:

**PT.PP (Persero) Jakarta**

Judul : Metode Sand Pumping Bali Beach  
Conservation Project

Kategori : TEKNIK KONSTRUKSI

**PT. Wiratman & Associates- Jakarta**

Judul : Solusi Inovatif Pembangunan  
Waduk Keuliling-NAD

Kategori : TEKNOLOGI KONSTRUKSI

**Dr. Ing. Ir. Eugenius Pradipto-  
Yogyakarta**

Judul : Bangunan Bambu Bentang Lebar

Kategori : TEKNIK ARSITEKTUR

**PT. Berkas Anugerah Raya- Surabaya**

Judul : Alpomain Road Maintenance  
Truck

Kategori : TEKNOLOGI TEPAT GUNA

**PT. Duta Cerma Mandiri**

Judul : Bangunan Gedung Departemen  
Perdagangan RI

Kategori : TEKNIK ARSITEKTUR

Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia  
(18 September-9 November)

Merupakan kumpulan informasi yang  
dikemas secara rapi berupa tulisan-  
tulisan yang populer, foto atau gambar-  
gambar mengenai karya konstruksi di  
wilayah RI yang dipandang layak dan  
memadai yang memenuhi persyaratan  
teknis teknologi dan berwawasan  
lingkungan.

Konferensi & Pameran Internasional di  
Jakarta (29-31 Oktober)

Merupakan ajang untuk kemampuan  
konstruksi di level nasional sekaligus  
membuka peluang bagi masyarakat  
konstruksi Internasional untuk melihat  
potensi Indonesia dalam bidang  
konstruksi.

Keikutsertaan dalam The Big 5 Building  
The Middle East & Misi Konstruksi ke  
Kawasan Timur Tengah (23-27  
November)

Sebagai sarana memperkenalkan insane  
dan dunia konstruksi tanah air kepada  
masyarakat dunia Internasional,  
sekaligus menjadi tolok ukur  
keberhasilan sektor konstruksi Indonesia  
dengan Negara-negara di Timur Tengah.



Pelepasan Jalan dan Sepeda Santai KI 2008

Charity Golf Tournament (30 November  
2008)

Merupakan bentuk kepedulian terhadap  
kesehatan masyarakat konstruksi  
sekaligus menjadi ajang temu akrab di  
antara para pelaku jasa konstruksi,  
dilaksanakan di Royale Golf Club Halim  
III. Acara ini diresmikan oleh Wakil  
Presiden Jusuf Kalla dan sebagai bentuk  
kepedulian tersebut telah diberikan  
dana charity kepada Yayasan Pendidikan  
Putera sebesar Rp. 100 juta dan Dharma  
Wanita Persatuan Dep. PU sebesar Rp. 50  
juta.

Jalan Santai & Funbike (7 Desember)

Merupakan kesempatan bagi  
masyarakat luas untuk memeriahkan  
kegiatan Konstruksi Indonesia sekaligus  
turut dalam upaya meningkatkan  
kesehatan masyarakat. Kegiatan ini  
dilaksanakan di Silang Monas.  
(TW, Sekretariat BPKSDM)



Pekerja dan pekerjaan konstruksi



Pekerja konstruksi dalam kiprahnya

sesuai dengan yang diharapkan oleh Permen 09.

### Kesiapan dana

Sebenarnya masalah tersedianya dana untuk memasukkan K3 ke dalam biaya proyek bukan menjadi kendala. Mengingat hal tersebut sudah menjadi komitmen pimpinan tertinggi, secara teoritis dan otomatis dana pasti akan tersedia.

Kendalanya justru ada dalam analisa harga satuan yang belum tersedia seperti telah diuraikan diatas.

### Sasaran bertahap

Mengaca kepada kenyataan yang ada maka sasaran pencapaian untuk pelaksanaan K3 ini juga direncanakan secara bertahap. Untuk setiap tahun anggaran dapat diterapkan pada 10% dari proyek yang ada dimulai dari tahun 2009 ini, sehingga pada tahun 2015 diharapkan sudah diterapkan pada separuh dari proyek yang ada.

Hal ini terasa agak janggal, mengingat bahwa Permen tersebut menyebutkan agar semua proyek segera menerapkannya, tanpa kecuali.

Mungkin penyebabnya adalah tidak adanya pasal mengenai sanksi bagi proyek yang tidak melaksanakan.

### Perlu unit kerja khusus

Pada saat ini, kegiatan K3 berada dibawah kewenangan dan koordinasi dari Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia khususnya pada Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi.

Mengingat lingkup pekerjaan akan semakin luas sebaiknya dimasa yang akan datang ada satu unit kerja di tingkat Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani masalah K3. Kalau untuk saat ini saja ada unit kerja setingkat Eselon 3 yang menangani masalah Lingkungan seperti yang ada di Ditjen Bina Marga, sementara lingkungan sebenarnya adalah salah satu 'bagian' dari K3 maka bisa saja unit kerja tersebut menjadi Subdit Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).

Memulai dengan baik adalah setengah dari keberhasilan, begitu kata-kata bijak yang sering kita jumpai. Mudah-mudahan demikian pula dengan 'keinginan luhur' untuk ber K3 di proyek-proyek bidang pekerjaan umum. Jangan sampai yang sudah dimulai dengan baik tersebut hanya menjadi sekedar dagelan atau bahkan tragedi.

Penulis adalah Widyaiswara Madya Departemen PU

# SIAPKAH KITA MELAKSANAKAN SMK3 KONSTRUKSI ?

Oleh : Eddy Sunyoto

**D**epartemen Pekerjaan Umum pada 1

Juli 2008 telah menerbitkan Peraturan Menteri PU No: 09/PRT/M/2008 tentang Sistem Manajemen K3 Konstruksi. Dalam Permen tersebut, diatur tentang kewajiban melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi (SMK3 Konstruksi) bagi proyek-proyek yang berada dalam binaan Dep. PU. Untuk lebih menggalakkan pelaksanaan K3 tersebut, pada tanggal 12 Februari 2009 Menteri Pekerjaan Umum dengan segenap jajaran eselon satu menanda tangani Pakta Komitmen bersama mitra kerjanya yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). Pada kesempatan tersebut Menteri PU juga menandatangani Kebijakan K3 di Departemen PU.

Sebagai langkah awal, lengkaplah sudah upaya *kick off* pelaksanaan K3 di lingkungan Dep PU.

Dengan adanya perangkat aturan dan komitmen dari pimpinan puncak untuk melaksanakan K3 ini maka tidak ada hambatan dan alasan lagi bagi terselenggaranya K3 secara baik dan menyeluruh untuk paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dep PU. Teorinya begitu.

Namun, benarkah kita sudah siap 'lahir batin' untuk melaksanakan hal tersebut?

### Kesiapan SDM

Dalam peraturan menteri tersebut, bagi proyek-proyek yang mempunyai risiko K3 tinggi perlu melibatkan Ahli K3 Konstruksi baik dari pihak Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa. Sementara untuk yang berisiko sedang dan rendah, cukup dengan Petugas K3 saja.

Ahli K3 Konstruksi yang dimaksud adalah tenaga ahli yang mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK (dalam hal ini dilaksanakan oleh Asosiasi Ahli K3 Konstruksi Indonesia A2K4 Indonesia). Sementara Petugas K3 adalah seseorang

yang telah mendapat pendidikan dan latihan bidang K3 dengan kualifikasi tertentu.

Mengingat demikian banyaknya paket pekerjaan yang ditangani oleh Dep PU, sebagai gambarannya untuk tahun 2009 ini ada 869 Satuan Kerja dengan anggaran mendekati Rp 35 triliun, maka jumlah Ahli K3 Konstruksi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai lima ribuan orang. Sungguh merupakan angka yang sangat luar biasa.

Menurut data dari A2K4 Indonesia, pada saat ini baru ada sejumlah 1300-an ahli K3 Konstruksi yang tersebar diseluruh pelosok tanah air. Secara teoritis, ada *baglog*, kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga sejumlah 3700 orang Ahli K3 Konstruksi. Belum lagi Petugas K3 yang tentunya lebih banyak lagi dibutuhkan.

Pertanyaannya selanjutnya adalah: bagaimana upaya pemenuhan tenaga tersebut? Sudahkah kita mempunyai program untuk mengantisipasi hal tersebut?

Angka-angka diatas belum termasuk untuk kegiatan di bidang ke-PU-an yang ada dibawah binaan pemerintah daerah: provinsi, kabupaten dan kota. Bukankah paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka juga 'terkena' ketentuan Permen 09 ini?

### Kesiapan administrasi

Sebagai aturan main yang lebih rinci dari Permen 09 ini tentunya harus dikeluarkan berbagai Petunjuk Teknis maupun Petunjuk Pelaksanaan yang akan dipakai sebagai pegangan di lapangan.

Misalnya: petunjuk tentang bagaimana cara memasukkan komponen biaya K3 kedalam harga satuan masing-masing mata pembayaran. Ini sungguh merupakan hal yang tidak mudah bahkan sangat rumit.

Petunjuk semacam ini mendesak dan segera diperlukan untuk dapat menyelenggarakan SMK3 Konstruksi



# FAST TRACK JALUR BIROKRASI JENJANG KARIR PNS



Sertijab eselon III di lingkungan BPKSDM

Jakarta, 02/02/09 (BPKSDM) Kinerja Pemerintah kita saat ini masih sangat terbatas pada birokrasi, termasuk dalam hal jenjang karir. Padahal tak jarang birokrasi tersebut justru menghambat kemajuan organisasi. Tak ada salahnya bila ke depan disiapkan semacam 'fast track' jalur birokrasi yang memungkinkan kemudahan jenjang karir bagi intelektual muda yang berbakat tanpa harus 'urut kacang'. Demikian disampaikan Kepala BPKSDM Sumaryanto Widayatin pada Serah Terima Jabatan Eselon III di Lingkungan BPKSDM dan Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan BPKSDM.

"Tuntutan manajemen modern mengharuskan kita harus cepat dan profesional dalam bertindak", tambah Sumaryanto. Karenanya di masa mendatang seharusnya tidak perlu lagi antri urutan kacang untuk memegang jabatan strategis bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan profesional. Tentunya hal ini menjadikan setiap staf di BPKSDM khususnya dan PU pada umumnya untuk meningkatkan kinerjanya.

Pejabat yang dilantik dan diserahterimakan antara lain : Rachman Arief Dienaputra sebagai Kepala Bidang Sarana Usaha Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi menggantikan Riad Horem, Sari Mustika sebagai Kepala Balai Peningkatan Keahlian Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan (Bandung) Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi menggantikan Susanto Sijoatmodjo, Hasto Agoeng Sapotro Kepala Balai Peningkatan Keahlian Pengembangan Wilayah dan Teknik Konstruksi (Semarang) Pusbiktekk menggantikan Djoko Sugiono.

Aca Ditamihardja sebagai Kepala Bidang Kompetensi Keterampilan Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menggantikan Krisna Nur Miradi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan



Kepala BPKSDM

Keterampilan Konstruksi Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Al Ansyori sebagai Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Yogyakarta Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menggantikan John Hendry, serta Toto Siswanto sebagai Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Jayapura Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menggantikan H. Endang Kalidah.

Sedangkan pengambilan sumpah jabatan dilakukan kepada 13 PNS baru di lingkungan BPKSDM yang telah memenuhi persyaratan. Kepala BPKSDM mengajak kepada seluruh staf di lingkungan BPKSDM untuk selalu meningkatkan kemampuan diri dan profesional menjalankan amanah yang telah diberikan demi kemajuan bersama. Apabila dalam perjalanannya ditemui permasalahan hendaknya dikomunikasikan tentunya dengan cara yang baik dan sesuai jalur. (Tw/nn)



Pengambilan sumpah PNS

## SEKTOR JASA KONSTRUKSI

MASIH MAMPU SERAP TENAGA KERJA DI TENGAH KRISIS EKONOMI



Sumaryanto Widayatin

Jakarta, 11/02/09 (BPKSDM) Kepala BPKSDM Sumaryanto Widayatin menyadari arti penting industri jasa konstruksi sebagai salah satu sektor yang 'masih' mampu menyerap tenaga kerja cukup besar di Indonesia saat ini. Seperti diketahui krisis ekonomi global yang baru-baru ini melanda berdampak cukup besar pada berbagai sektor, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dari mulai banyaknya industri yang gulung tikar, jumlah pengangguran yang bertambah, hingga ekspor yang mandeg.

"Ternyata proyek-proyek infrastruktur menjadi solusi yang nyata untuk menjawab persoalan tersebut, terutama untuk menyerap tenaga kerja", dijelaskan Sumaryanto Widayatin pada forum Pemberdayaan Pembina Jasa Konstruksi Kab/Kota Rabu (11/02) di Jakarta. Untuk alasan tersebut maka infrastruktur harus sepenuhnya dibina dan didukung dari segala sisi, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, hingga pengawasan yang memadai.

Dikatakan Sumaryanto, Pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten/kota merupakan ujung tombak pemberdayaan terutama pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi. Karenanya sangat diharapkan pembina jasa konstruksi memaksimalkan potensi yang ada untuk mendorong kemajuan industri konstruksi di daerah masing-masing. Misalnya saja dalam hal pengaturan adanya kreatifitas Pembina

dalam bidang peraturan Per-Undang-undangan bersama dengan DPRD, tentunya regulasi yang akan mendorong kemajuan.

Sebaliknya, ditekankan oleh Kepala BPKSDM apabila ditemukan konflik antara Undang-undang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya dengan Undang-undang Otonomi Daerah hendaknya jangan dibesar-besarkan perbedaan tersebut. "Mari kita mencari persamaan visi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan melalui Undang-undang daripada berkutut dalam perbedaan", tegas Sumaryanto.

Hingga saat ini telah ada 155 kabupaten/kota yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan ini, dan diharapkan akan bertambah lagi untuk selanjutnya. Dengan adanya pemberdayaan ini pula diharapkan akan dicapai penyamaan persepsi misi pembangunan jasa konstruksi maupun kesamaan wawasan akan jasa konstruksi itu sendiri. Kepala BPKSDM juga memberikan informasi bahwa tahun 2009 adalah tahun Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ditandai dengan akan ditandatanganinya naskah komitmen pelaksanaan K3 oleh Menteri PU dan Menakertrans dalam waktu dekat ini. (Tw/nn)

## Kabar dari Balai Jogja MOBILE TRAINING UNIT ANDALAN PERCEPATAN SERTIFIKASI

**P**erjalanan buletin BPKSDM kini tiba di kota Pelajar Yogyakarta. Di salah satu sudut kota tua penuh sejarah ini, tepatnya di wilayah Kotagede disanalah terdapat Balai Pelatihan Konstruksi Yogyakarta. Balai ini menjadi salah satu ujung tombak BPKSDM menghasilkan tenaga kerja terampil yang tentunya berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tak ada salahnya mari kita kenali lebih dalam Balai yang berada di bawah Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) ini.

Balai Pelatihan Konstruksi Yogyakarta atau resminya Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Yogyakarta berdiri pada Tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 409/KPTS/M/2001 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 568/PRT/M/2005 tanggal 13 Desember 2005. Saat ini Balai Pelatihan Konstruksi Yogyakarta didukung oleh 19 pegawai dan 14 tenaga kontrak, meski demikian Balai ini telah menghasilkan 11.810 orang tenaga kerja konstruksi sejak tahun 2002 hingga 2008.

Balai yang wilayah kerjanya mencakup wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Kalimantan ini memiliki tugas Melaksanakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan Keterampilan dan Keahlian Tenaga Konstruksi. Bidang yang pernah dilatihkan sekaligus diujikan antara lain Mandor Konstruksi Bangunan Tahan Gempa, Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Gedung, Pelaksana Pekerjaan Irigasi, dan seterusnya.

Namun di tahun 2009 ini ada penambahan atau dengan kata lain belum pernah dilaksanakan sebelumnya antara lain Pelatihan Steel Erection of Bridge, Pelatihan Mandor Perkerasan



Mobil Training Kellinging





Lab. Uji kompetensi

Jalan, serta yang menjadi unggulan Uji Tukang menggunakan Mobile Training Unit (MTU). MTU adalah semacam perangkat uji tenaga terampil dalam kendaraan (berupa mobil) sehingga dapat digunakan setiap saat dan menjangkau tempat-tempat pelosok.

MTU merupakan terobosan baru menguji tenaga terampil dan mempercepat proses sertifikasi tenaga kerja terampil konstruksi. Disebut terobosan baru karena dengan menggunakan MTU uji dapat dilakukan dengan segera tanpa menunggu peserta mencapai jumlah tertentu (biasanya 80 orang). Bahkan uji dapat dilaksanakan tanpa memakai sistem birokrasi yang berbelit-belit, karena sistemnya yang *mobile* maka setiap saat perangkat ini dapat diberangkatkan menuju tempat yang ditentukan.

Peralatan yang tersedia pada MTU untuk diujikan antara lain kompresor, genset, pemotong keramik dan kayu, penghalus kayu, dan lain sebagainya. Dengan adanya MTU ini diharapkan target percepatan sertifikasi tenaga konstruksi terampil akan tercapai, demikian sebagaimana dikatakan Antien Julianti Kepala Sub.Bag Tata Usaha Balai Pelatihan Konstruksi Yogyakarta saat diwawancarai redaksi.

Meski demikian tidak berarti tak ada masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian target tersebut. Menurut Antien terkadang peserta yang mengikuti tidak memenuhi standar minimal sehingga ketika dilakukan pengujian banyak yang tidak lulus. Selain itu juga terkadang untuk bisa melaksanakan pelatihan ataupun ujian harus menunggu dari daerah sehingga sulit mempercepat proses sertifikasi ataupun pelatihan.

Permasalahan lain yang dihadapi antara lain Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II

Yogyakarta sampai saat ini belum mempunyai gedung atau kantor sendiri, sehingga pada saat ini masih menempati Gedung Aset Balai Diklat yang bersifat serah kelola pada Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Yogyakarta, dengan fasilitas terbatas.

Tak hanya itu sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelatihan dan uji masih perlu ditambah, terutama perangkat untuk praktek lapangan. Penambahan dan pengembangan Sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya sebagai penentu utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Yogyakarta juga penting. Serta masih terdapatnya perbedaan pandangan/persepsi, asumsi dan parameter pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2007, antara Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Yogyakarta dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa permasalahan-permasalahan tersebut menghalangi usaha Balai Pelatihan Konstruksi Yogyakarta untuk terus meningkatkan usaha mencetak tenaga-tenaga terampil profesional serta menghasilkan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Apalagi mengingat tantangan saat ini dimana tenaga kerja konstruksi dituntut mampu masuk ke pasar Internasional seiring tantangan pengembangan jasa konstruksi yang semakin besar.

Adanya pemilihan program kegiatan yang tepat dengan kebutuhan akan memberikan manfaat lebih banyak pada masyarakat khususnya pada pengguna jasa konstruksi maupun pelaksana lapangan. Pembekalan keterampilan dalam bidang konstruksi tidak saja membekali diri akan tetapi dapat memberikan 'transfer knowledge' kepada masyarakat. Untuk itulah ke depannya Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah II Yogyakarta ini diharapkan lebih banyak memberikan pelatihan, uji kompetensi, bimbingan teknis dan sosialisasi yang lebih tepat. Dengan demikian Balai yang saat ini dipimpin Drs. Al Ansjori ini dapat mewujudkan masyarakat jasa konstruksi yang profesional dan handal hingga tenaga konstruksi kompeten 2010 akan tercapai. (TW, Sekretariat BPKSDM)

## INTERMEZZO

Tulisan ini memang tidak berbobot, tapi sekedar untuk intermezzo ditengah-tengah kesibukan kerja. Judul saya peroleh dari milis yang anonym, namun demikian enak juga kalau dibaca.

Mari kita hubungkan antara abjad dan angka yaitu dengan memberikan penilaian sebagai berikut:

A = 1	H = 8	O = 15	V = 22
B = 2	I = 9	P = 16	W = 23
C = 3	J = 10	Q = 17	X = 24
D = 4	K = 11	R = 18	Y = 25
E = 5	L = 12	S = 19	Z = 26
F = 6	M = 13	T = 20	
G = 7	N = 14	U = 21	

Sekarang mari kita hitung bersama-sama kata-kata dibawah ini dan diandaikan sebagai prosentasi kegiatan/sikap seseorang:

H A R D W O R K	(kerja keras)
8 1 18 4 23 15 18 11	Jumlah 98%
K N O W L E D G E	(pengetahuan)
11 14 15 23 12 5 4 7 5	Jumlah 96%
L O B B Y I N G	(pendekatan)
12 15 2 2 25 9 14 7	Jumlah 86%
L U C K	(keberuntungan)
12 21 3 11	Jumlah 47%

Jika dilihat angka-angka diatas sebagai semua nilai dari usaha-usaha seseorang....

Ternyata belum bisa mengalahkan kegiatan / sikap dibawah ini:

A T T I T U D E	(sikap/tingkah laku)
1 20 20 9 20 21 4 5	Jumlah 100%

Kata-kata dibawah ini adalah kata yang berbahasa Indonesia, berapakah nilai yang ditemukan:

G I G I H	(hardwork)
7 9 7 9 8	Jumlah 40%
I L M U	(knowledge)
9 12 13 21	Jumlah 86%
L O B I	(lobbying)
12 15 2 9	Jumlah 38%
M U J U R	(luck)
13 21 10 21 18	Jumlah 83%
S I K A P	(Attitude)
19 9 11 1 16	Jumlah 83%

K O R U P S I	
11 15 18 21 16 19 9	Jumlah 109%

Nah sekarang mari kita terjemahkan kata KORUPSI kedalam bahasa inggris, berapa ya...jumlahnya....

Sekali lagi ini hanya sekedar intermezzo, dan mudah-mudahan semangat kerja kita mengikuti yang berbahasa inggris di atas.

# BPKSDM

## Siapkan Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Untuk Proyek PT. Waskita Karya di Abu Dhabi

Sebagai tindak lanjut Misi Konstruksi ke Dubai yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, BPKSDM bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan PT. Waskita Karya melaksanakan pengujian tenaga kerja konstruksi. Pelatihan ini ditujukan untuk sertifikasi sekaligus akan dikirimkan ke Abu Dhabi untuk mengerjakan proyek PT. Waskita Karya disana. Assesment atau pengujian dilaksanakan mulai Senin (23/02) di Jakarta.

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (Pusbin KPK) BPKSDM Andreas Suhono yang meninjau langsung pengujian ini mengatakan sangat mendorong agar tenaga-tenaga konstruksi Indonesia berkiprah di pasar Internasional, terutama saat ini di Timur Tengah. Sekaligus juga sangat menghargai PT. Waskita Karya yang memberikan seluas-luasnya kepada tenaga kerja Indonesia untuk mengerjakan proyek mereka di luar negeri.

Direncanakan akan dilakukan assesment untuk proyek PT. Waskita Karya yang ada di Abu Dhabi, Dubai, dan Riyadh. Untuk tahap pertama, pengujian dilakukan kepada 200 orang Tukang Konstruksi untuk Proyek Waskita Karya di Abu Dhabi United Emirates Arab berupa proyek High Risk Building. Untuk proyek di Dubai dan Riyadh masih menunggu proses pelelangan yang saat ini masih berlangsung.

Ahmad Hudaya dari Paguyuban Mandor dan Tukang Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat, sebagai pihak yang ditunjuk untuk merekrut tenaga tukang mengatakan bahwa saat ini kesadaran akan sertifikasi sudah mulai tinggi. Terbukti permintaan akan tenaga konstruksi bersertifikat terus berdatangan dari pelaksana proyek, salah satunya dari PT. Waskita Karya. Hanya saja masih perlu kerja keras dan kerjasama semua pihak untuk dapat melatih tenaga kerja yang saat ini masih banyak belum memiliki kompetensi sesuai standar dan tentunya belum memiliki sertifikat.

Setiap harinya akan diuji sebanyak 50 orang dimana seleksi awal dilakukan melalui penyaringan dengan praktek langsung sehingga akan didapatkan tukang yang benar-benar tukang. Setelah itu baru dilakukan assesment atau pengujian yang sesuai prosedur. (tw/nn)



Uji sertifikasi tukang



Uji tukang oleh Asesor



Koordinasi pelaksana proyek